

## ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN BAHASA YANG TEPAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT

Alifiea Naura Rafalita<sup>1</sup>, Nabila Alifiah Artasyah<sup>2</sup>, Siti Zubaidah<sup>3</sup>, Cindy Stefany Angelica<sup>4</sup>,  
Mohammad Brilliyantno Putra Siswoyo<sup>5</sup>, Natalia Desy Anggraeni<sup>6</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univertas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

[24041010203@student.upnjatim.ac.id](mailto:24041010203@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [24041010197@student.upnjatim.ac.id](mailto:24041010197@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[24041010090@student.upnjatim.ac.id](mailto:24041010090@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>, [24041010333@student.upnjatim.ac.id](mailto:24041010333@student.upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>,  
[24041010202@student.upnjatim.ac.id](mailto:24041010202@student.upnjatim.ac.id)<sup>5</sup>, [nataliadesy2412@gmail.com](mailto:nataliadesy2412@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Artikel ini akan membahas terkait penggunaan bahasa yang tepat untuk menyampaikan suatu kebijakan publik, hal tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan apakah informasi ataupun kebijakan publik yang disampaikan dapat dipahami serta benar-benar tersampaikan secara baik oleh masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan suatu pembuat kebijakan publik dalam penggunaan bahasa yang tepat, serta mencari strategi yang tepat untuk hambatan tersebut. Penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan lugas dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam kebijakan tersebut. Adapun sebaliknya, apabila penggunaan bahasa yang ambigu dan bertele-tele maka akan cenderung menyebabkan publik memiliki pemahaman yang kurang jelas sehingga terjadi kebingungan serta informasi yang terlewat. Penggunaan bahasa yang rumit akan menjadi hambatan dalam pemahaman kebijakan publik terhadap masyarakat, yang pastinya juga mengurangi tingkat partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan aspek bahasa yang digunakan dalam merancang kebijakan yang komprehensif serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana komunikasi antara pemerintah dengan publik akan menjadi lebih efektif guna meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

**Kata kunci:** Penggunaan Bahasa, Tepat, Kebijakan Publik, Pemahaman Publik

### Abstract

*This article will discuss the proper use of Indonesian language to convey a public policy, it has a very important role in showing whether the information or public policy that is conveyed can be understood and really conveyed well by the community. The research was conducted by identifying what are the factors that hinder a public policy maker in using the right language, as well as looking for the right strategy for those obstacles. The use of clear, simple, and straightforward language can increase public understanding and participation in the policy. On the contrary, if the use of ambiguous and long-winded language, it will tend to cause the public to have a less clear understanding so that there is confusion and missed information. The use of complicated language will be an obstacle in the understanding of public policy towards the*

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker:

No 234.GT8.,35

Prefix DOI :

10.8734/Liberosis.v1i2.36

5

**Copyright : Author**

**Publish by : Argopuro**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*community, which of course also reduces the level of public participation in government policies. Policymakers must pay more attention to the language aspects used in designing policies that are comprehensive and easy to understand by all levels of society, where communication between the government and the public will be more effective in order to increase public participation in government policies.*

**Keywords:** Language Use, Appropriate, Public Policy, Public Understanding

## 1. Pendahuluan

Bahasa yang terdiri dari sistem lambang bunyi, digunakan oleh masyarakat sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, bahasa memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menyampaikan ide dan informasi. (Wahyudi & Ridha Ds, 2017) mengatakan bahwa bahasa adalah pranata sosial yang dimiliki setiap orang agar mereka dapat berfungsi dalam wilayah kelembagaan kehidupan sosial. Pada ranah kehidupan sosial bahasa memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media mengekspresikan budaya serta identitas antar kelompok. Walaupun berkomunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat selain bahasa, pada dasarnya yang paling utama adalah manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk dapat saling berinteraksi di tengah-tengah masyarakat sosial. Hubungan antara bahasa dan tingkat sosial masyarakat sangat erat, dan hubungan ini mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks sosial (Ningsih & Harahap, 2024). Maka dari itu suatu pembuat kebijakan publik harus dapat menjangkau pemahaman seluruh lapisan masyarakat sosial yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan namanya, kebijakan publik adalah kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik. Karena bahasa mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, bahasa sangat berkaitan dengan kebijakan publik. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.63/2019, yang mewajibkan komunikasi dalam bahasa ini di forum resmi pemerintah atau swasta, kebijakan publik di Indonesia harus disampaikan dalam bahasa Indonesia. Tujuan dari penyebaran ini adalah untuk memastikan bahwa pemahaman masyarakat menjadi jelas dan mengurangi kesalahan pemahaman. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 juga mengamatkan bahwa bahasa negara harus digunakan di semua forum resmi. Undang-undang ini adalah hasil dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus mewujudkan janji pemuda Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang diungkapkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 (Prameswari, 2017). Pasal 26 hingga 39 membahas bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam layanan administrasi publik. Membuat kebijakan publik sangat terkait dengan penggunaan bahasa ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 menetapkan bahwa semua dokumen dan administrasi publik di instansi pemerintahan harus menggunakan bahasa Indonesia (Akmaluddin, 2018). Munculnya kebijakan publik didasari oleh kebutuhan sebagai penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh para aktor-aktor tertentu. Untuk mencapai tujuan kegiatan pemerintah, kebijakan publik dibuat. Pelaksanaan kebijakan publik mencakup perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk mengelola program, serta partisipasi masyarakat, kekuatan ekonomi, sosial, dan politik (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik dalam masyarakat sudah pasti terdapat peran kebijakan publik sebagai instrumen paling utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur semua itu. Agar kebijakan publik dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh publik, maka penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Salah satu aspek yang sering kali diremehkan tetapi memiliki dampak yang besar yaitu penggunaan bahasa dalam penyusunan kebijakan publik sebagai alat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Bahasa yang digunakan seperti

dalam dokumen kebijakan, peraturan, maupun penyuluhan masyarakat dapat menjadi pengaruh sistem mana masyarakat memahami, merespon, dan dapat berpartisipasi dalam kebijakan di dalamnya. Dalam penggunaan bahasa yang kurang tepat, seperti istilah yang rumit, kalimat yang ambigu, atau penggunaan jargon teknis, cenderung menimbulkan kebingungan dan ketidaktahuan di kalangan masyarakat. Lapisan masyarakat mulai muncul sejak manusia menyadari organisasi sosial sebagai bentuk bersama (Syah, 2015). Tidak semua kalangan masyarakat dapat memahami kalimat yang di dalamnya terdapat jargon teknis. Sehingga bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan penerimaan kebijakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh penggunaan bahasa yang tepat dalam kebijakan publik terhadap pemahaman masyarakat menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Lalu bagaimana penggunaan bahasa dalam pengambilan kebijakan publik dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

## 2. Metodologi

Metode yang diterapkan untuk analisis ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Juga bergantung pada pengolahan data deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi suatu situasi dengan memberikan gambaran yang mendalam tentang kondisi dalam lingkungan yang alami (lingkungan alami) (Fadli, 2021). Pada dasarnya, penelitian akan dimulai dengan mencari data yang terkait dengan subjek (Ridwan et al., 2021). Memperoleh sumber dari beberapa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang dapat relevan membantu "Analisis Pengaruh Penggunaan Bahasa yang Tepat dalam Kebijakan Publik terhadap Pemahaman Masyarakat"

## 4. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan bahasa yang tepat suatu kebijakan serta ranah politik dapat dipahami secara baik, sebab hubungan erat antara kebijakan dengan bahasa dapat menghasilkan suatu produk hukum dan kebijakan. Bahasa sebagai peran penting dalam kebijakan publik guna menjadikan fungsi bahasa yang sesuai, sehingga hal tersebut tidak dijadikan sebagai senjata untuk mencurangi masyarakat atas kekuasaan yang sewenang-wenang dilakukan. Keberadaan ruang publik menjadi kunci utama untuk dapat memahami bagaimana pola komunikasi dalam matriks kekuasaan yang ada memetakan suatu relevansi yang saling imbang serta setara pada kelompok-kelompok partisipan. Terdapat beberapa dimensi penggunaan bahasa yang tepat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu seperti penggunaan bahasa yang jelas, bahasa yang sesuai konteks, serta penggunaan bahasa yang transparan. Apabila bahasa sesuai konteks, maka dapat memfasilitasi masyarakat dalam keikutsertaannya sebagai pengambilan suatu kebijakan. Bahasa transparan dapat membantu untuk menjelaskan suatu proses pengambilan keputusan serta bentuk implementasi kebijakan publik, sehingga kepercayaan publik meningkat dan proses evaluasi serta *controlling* dalam kinerja pemerintah dapat berjalan dengan efektif dengan hasil yang lebih representatif.

Pengaruh yang signifikan terkait jalannya pelaksanaan kebijakan publik dalam penggunaan bahasa yang tepat dapat dilihat dari peningkatan pemahaman oleh publik, tentu akan mengurangi kesalahpahaman terhadap kebijakan publik. Penggunaan jargon teknis dalam kebijakan publik menyebabkan implementasi yang tidak efektif, sebab sulit untuk diterapkan serta semakin menghambat tujuan dari kebijakan. Jargon teknis merupakan suatu istilah yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu dengan latar belakang teknis tertentu, sehingga hal tersebut tidak dapat menjangkau pemahaman seluruh lapisan masyarakat.

Adapun untuk menghindari penggunaan bahasa sebagai suatu alat dalam politik yang dapat memiliki dampak yang negatif, maka pemerintahan harus memiliki tanggungjawab

dalam menggunakan bahasa dengan bijak. Pemerintah bertanggungjawab memperhatikan makna dari kata-kata yang digunakan serta memikirkan dampak setelahnya terhadap opini publik, yang dimana guna membangun maupun memperkuat hubungan dengan masyarakat. Bahasa membantu membangun bangsa, menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam dalam suku, bahasa, dan budaya (Lestari & Pujiastuti, 2023). Maka dari itu, para aktor politisi juga harus memperhatikan penggunaan bahasa yang menghargai kemajemukan sehingga tidak terjadi perpecahan antar kelompok.

Penggunaan bahasa terhadap pemahaman publik memengaruhi kinerja publik. Karena bahasa membantu pemerintah dan masyarakat berkomunikasi satu sama lain, komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik tidak boleh membingungkan, ketidakjelasan selalu menghalangi implementasi kebijakan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan publik harus dipastikan secara konsisten dan jelas. Sesuai dengan Undang-Undang maka kebijakan publik harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2020, tentang biaya atau tarif layanan pada pusat kesehatan masyarakat di kabupaten Sidoarjo, layanan umum daerah, "Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 101), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini". Kebijakan publik yang ada di Surabaya terkait kebijakan kawasan bebas rokok. Sebagai tanggapan atas dampak negatif rokok terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, pemerintah kota Surabaya mengeluarkan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Peraturan ini dilanjutkan dengan peraturan walikota nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 April 2019. Peraturan ini dibuat karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menganjurkan pola hidup sehat secara teratur, dan bahwa merokok dapat mengganggu atau menurunkan kesehatan baik perokok maupun orang lain yang bukan perokok (perokok pasif) yang ikut menghisap dan menghirup asap rokok mereka (Dion & Woro Astuti, 2022). Kebijakan serta peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut sudah jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat dengan efektif. Namun terdapat beberapa masyarakat yang kurang dapat memahami kebijakan publik yang dikeluarkan, hal tersebut disebabkan sumber daya manusia yaitu seorang pembuat kebijakan yang kurang cakap terhadap penggunaan bahasa yang tepat dalam suatu kebijakan publik. Sehingga kurangnya ruang kesempatan bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah tersebut.

## 5. Simpulan

Penggunaan bahasa yang tepat dalam kebijakan dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Bahasa memiliki peran penting dalam menciptakan produk hukum dan kebijakan yang baik. Hal ini diperlukan agar bahasa tidak disalahgunakan sebagai senjata untuk menipu masyarakat demi kekuasaan yang semena-mena. Ruang publik menjadi kunci utama dalam memahami pola komunikasi antar kelompok partisipan dengan seimbang. Beberapa dimensi penggunaan bahasa yang tepat, seperti kejelasan, keselarasan konteks, dan transparansi, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Bahasa yang sesuai konteks dan transparan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembuatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menggunakan bahasa dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam politik dan kebijakan. Penggunaan jargon teknis dalam kebijakan publik dapat menghambat implementasi kebijakan karena hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Kerangka hukum di Indonesia, termasuk Peraturan Presiden

No.63/2019 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, telah menggariskan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen resmi negara. Komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, konsistensi dan kejelasan dalam implementasi kebijakan publik juga diperlukan. Kebijakan publik harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti contoh kebijakan kawasan bebas rokok di Surabaya. Maka, penggunaan bahasa yang tepat dalam kebijakan publik bukanlah sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan demokrasi substantif. Melalui bahasa yang cermat, inklusif, dan bermakna, pemerintah dapat membangun jembatan komunikasi yang kuat dengan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan.

## Daftar Referensi

- Akmaluddin, N. (2018). Realitas Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulisan pada Lembaga Pemerintahan. *MABASAN*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.31>
- Dion, S. E., & Woro Astuti, S. J. (2022). Penerapan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok di Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 157–178. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.75>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Lestari, D., & Pujiastuti, I. (2023). Posisi Bahasa Indonesia dalam Dokumen Kebijakan Bahasa di Perguruan Tinggi. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 19(1), 116–126. <https://doi.org/10.25134/fon.v19i1.6461>
- Ningsih, D. S., & Harahap, M. K. (2024). *Dasar-Dasar Dialektologi: Pemahaman Variasi Bahasa dalam Suatu Sosial Masyarakat*. 8.
- Prameswari, J. Y. (2017). *Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap Pendidikan Bahasa Indonesia*. 4(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 11(01).
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Syah, R. H. (2015). Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>
- Wahyudi, W., & Ridha Ds, M. (2017). Urgensi Mempelajari Psikolinguistik terhadap Pembelajaran Bahasa. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 113–140. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i1.202>